

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MANGGARAI

Kata Pengantar

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Manggarai memiliki peran yang penting sebagai Pengendali Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Peran yang harus dikawal Dinas P2KB semakin menantang karena memberikan kontribusi dalam usaha menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Salah satu cara menekan LPP yaitu dengan meningkatkn *Contraseptive Prevalence Rate (CPR)*. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai mendukung visi Bupati Manggarai Periode 2025 – 2029, yaitu **“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah menetapkan sasaran yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021- 2026, yaitu :

Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dengan indikatornya:

- a. Menurunnya TFR dari 2,07 menjadi 2,01 pada Tahun 2025
- b. Meningkatnya Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dari 72,72 % menjadi 75,73 % di Tahun 2025
- c. Menurunnya unmet need dari 11.38 % menjadi 10,7 % pada Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, Dinas P2KB melaksanakan 3 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, dengan dukungan dana/ anggaran sebesar Rp. 9.268.736.808

Program – program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Ruteng, 05 Februari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai



Maria Yustina Diana Baru, S.ST., M.Kes

Pembina

NIP. 19710924 199903 2 006

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar isi..... ii

Ringkasan Eksekutif iii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang 1

 B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1

 C. Struktur Organisasi 2

 D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....6

 A. Rencana Strategis 2021 – 2026 6

 B. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target..... 8

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....11

 A. Capaian Kinerja..... 11

 B. Realisasi Anggaran 17

BAB IV PENUTUP27

 A. Strategi Peningkatan Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah..... 28

 B. Uraian Strategis Pemecahan Masalah serta langkah-langkah antisipatif yang diambil..... 29

Ringkasan Eksekutif

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 telah berhasil mencapai target *Total Fertility Rate* (TFR), Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Persentase Masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK, Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk, Persentase Keluarga Sejahtera dan Persentase PPKS yang aktif.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan adalah 94,61%. Indikator – indikator dari keempat sasaran DP2KB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)
1	2	3		4
1	TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1.1	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)	119
		1.2	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	87
		1.3	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	78
		1.4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)	98
		1.5	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	100
		1.6	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	71
		1.7	Persentase Keluarga Sejahtera	128,9
		1.8	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan Aktif	75
Rata – rata sasaran				94,61
Kategori			Baik	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, capaian indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai ada 3 (tiga) indikator yang nilainya di bawah 80% dan 5 (lima) indikator lainnya di atas 80% dengan nilai capaian rata-rata 94,61%.

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Adanya penyuluhan dan KIE yang dilakukan secara intensif mengenai Keluarga Berencana;
 - b. Adanya upaya – upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD);
 - c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi;
 - d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok – pelosok;
 - e. Adanya pembinaan bagi kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Adapun hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun;
 - b. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar (muda paritas rendah), yaitu PUS yang jumlah anaknya masih atau dibawah 2 orang, agar memiliki cukup 2 (Dua) anak;
 - c. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi;
 - d. Keterlambatan ketersediaan stok alat kontrasepsi yang diminati calon akseptor KB.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kurang berhasil pencapaian sasaran yaitu :

1. Langkah-langkah antisipatif, yaitu:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi/penyuluhan.
 - b. Membentuk wadah PIK-R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa).
 - c. Mengupayakan agar Alokon KB selalu tersedia di Gudang DP2KB.
2. Langkah-langkah korektif, yaitu:

Melakukan koordinasi dengan faskes – faskes mengenai ketersediaan Alokon KB, apabila ada permintaan alokon KB di DP2KB yang tidak bisa terpenuhi karena kehabisan stok.

Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp. 9.268.736.808,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan/ program yang langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.746.153.850 dengan realisasi Rp.4.836.150.822 atau 92,74 %, sedangkan untuk kegiatan/program penunjang/pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 2.522.582.958 dengan realisasinya Rp. 2.425.771.913 atau 96,16 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan mengendalikan tingkat kelahiran, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dan mewujudkan ketahanan keluarga.

Hasil capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai ditunjukkan pada Laporan Kinerja sesuai RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai 2021 – 2026. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Dasar hukum berdirinya organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah **Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

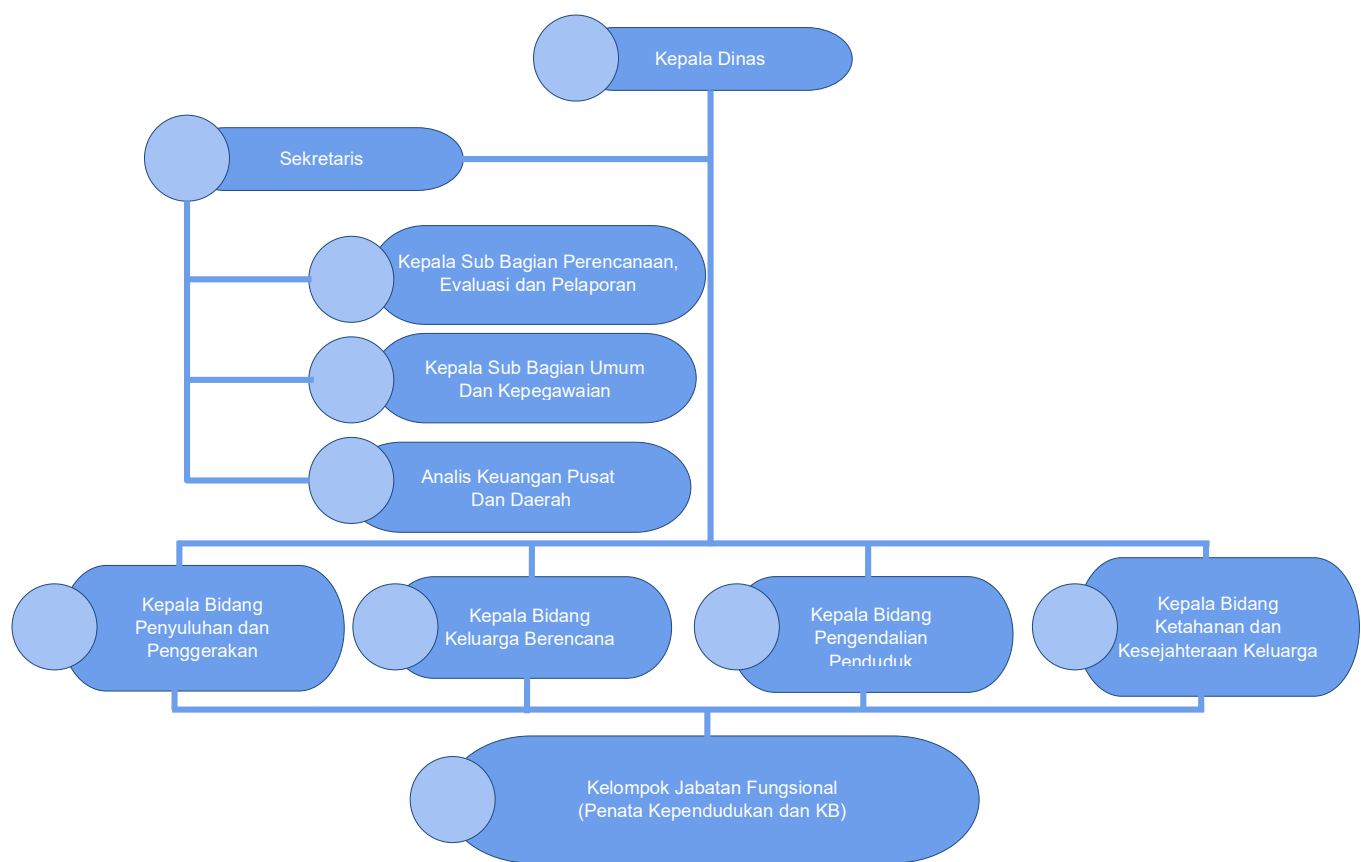
2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

- a. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kesekretariatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- b. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah :
 - Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan KB; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi unit Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai terdiri dari:
- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan staf pelaksana.



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)	Eselon	Ket.
1.	Kepala Dinas	1	II-B	Terisi
2.	Sekretaris	1	III-A	Terisi
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	1	III-B	Terisi
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	1	III-B	Terisi
5.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengerakan	1	III-B	Terisi
6.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	III-B	Terisi
7.	Kepala Sub Bagian	2	IV-a	Terisi
8.	Pejabat Fungsional	8	-	Terisi
9.	Staf PNS	4	-	Terisi
10.	Staf CPNS	13	-	Terisi
11.	Staf PPPK	3	-	Terisi
12.	THL	2	-	Terisi
13.	PLKB Kontrak	3	-	Terisi
Total		41		

Susunan Kepegawaian menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kabid	-	4	-	-	4
4.	Kasubag	1	-	1	-	2
5.	Pejabat Fungsional	1	3	2	2	8
6.	Pelaksana PNS	2	13	-	2	17
7.	Staf THL	1	-	-	1	2
8.	PPPK Penuh Waktu	-	-	-	3	3
9.	PKB Kontrak	-	1	-	2	3
Total		6	22	3	10	41

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, Perjanjian kinerja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas P2KB untuk setiap **pernyataan kinerja** sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap **pernyataan kinerja** sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas DP2KB sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, seperti :

1. Target dan realisasi belanja.
2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis
3. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 serta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang/urusan/Misi 1 (Satu) yaitu Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

1. VISI

Pernyataan Visi dan penjelasannya:

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021 –2026 yaitu: **“Manggarai Yang Maju, Adil Dan Berdaya Saing”**

a. **Manggarai** memiliki makna

- 1) **Spasial** sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.
- 2) **Masyarakat beserta sosial budaya Manggarai** yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

b. **Maju** artinya

- 1) Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
- 2) Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
- 3) Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. **Adil** artinya

- 1) Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.
- 3) Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
- 4) Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.
- 5) Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.

d. **Berdaya saing** artinya

- 1) Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.

- 2) Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
- 3) Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat

2. MISI

Pernyataan Misi dan penjelasannya

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai sejalan dengan Misi 1 dari Bupati dan Wakil Bupati Mangarai Periode 2021 – 2025, yaitu :

- a. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM)

3. TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RPJMD 2021 – 2026

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

B. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Berdasarkan tujuan di atas selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam sasaran strategis yang hendak dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Disamping itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi dengan target-target realisasi setiap tahunnya.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2021 – 2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan

sebagai Indikator Kinerja Utama.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan target Kinerja yang dimuat dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
1	TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1.1	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)	Per Wanita Usia Subur	2,01	IKU
		1.2	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	46,28	Indikator Kinerja Program
		1.3	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	74,73	Indikator Kinerja Program
		1.4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak	%	10,7	Indikator Kinerja Program
		1.5	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga	%	3,33	Indikator Kinerja Program
		1.6	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk	%	9,76	Indikator Kinerja Program
		1.7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	31,03	Indikator Kinerja Program

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6
		1.8	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	%	33,33	Indikator Kinerja Program

Untuk mencapai target indikator kinerja, tentu saja ada program yang diperlukan untuk mendorong capaian indikator kinerja. Program yang dilaksanakan DP2KB Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2025 adalah sbb :

Tabel 2.2 : Rincian Program dan Anggaran DP2KB Kab. Manggarai TA 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.522.582.958	DAU
2.	Program Pengendalian Penduduk	-	-
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.998.113.850	DAU + DAK FISIK + DAK NON FISIK
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.748.040.000	DAU + DAK NON FISIK
Total		9.268.736.808	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2025 untuk mencapai sasaran.

Berikut kami sajikan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran DP2KB Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (TPP)	94,61	Baik

Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Adapun pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana dikendalikannya LPP di Kabupaten Manggarai. Untuk mendukung

pencapaiannya, maka disusun program pendukung, disediakan fasilitas seperti Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan, alat dan obat kontrasepsi, mobil pelayanan KB keliling, kendaraan dinas roda 2 bagi PKB; SDM (PKB/PLKB dan PPKBD) dan dana. Pada tahun 2025, kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 94,61%.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai menetapkan 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang. Penyerapan anggaran tahun 2025 dari belanja langsung untuk mencapai sasaran ini adalah Rp. 7.699.306.217,- dari total anggaran sebesar Rp. 9.268.736.808,- dengan persentase pencapaian/penyerapan anggaran sebesar 83,07%. Adapun indikator untuk mencapai sasaran terdiri dari 8 indikator. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI		
1.	Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)	Per Wanita Usia Subur	2,01	1,62	119	IKU
2.	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	46,28	40,12	87	Indinator Kinerja Program
3.	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	74,73	58,48	78	Indinator Kinerja Program
4.	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,7	10,86	98	Indinator Kinerja Program
5.	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	3,33	3,35	100	Indinator Kinerja Program
6.	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	9,76	6,98	71	Indinator Kinerja Program
7.	Persentase Keluarga Sejahtera	%	31,03	40	128,9	Indinator Kinerja Program
8.	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	%	33,33	25	75	Indinator Kinerja Program

Dari 8 (Delapan) indikator pada tabel 3.2, satu indikator yaitu TFR merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas sedangkan tujuh indikator lainnya adalah Indikator Kinerja Program. Dari indikator-indikator pada

tabel 3.2 di atas, terdapat indikator – indikator yang realisasinya diharapkan semakin menurun dan terdapat juga indikator – indikator yang diharapkan nilainya semakin meningkat.

Indikator – indikator yang realisasinya diharapkan menurun adalah:

1. Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
2. Persentase cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need)

Untuk indikator – indikator tersebut, rumus untuk memperoleh nilai capaiannya adalah :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kedua rumus di atas akan menghasilkan nilai capain yang sama.

Sementara itu, Indikator-indikator yang realisasinya diharapkan meningkat adalah

1. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR),
3. Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),
4. Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk,
5. Persentase Keluarga Sejahtera, dan
6. Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif.

Untuk indikator-indikator tersebut, rumus untuk memperoleh nilai capaiannya adalah:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari delapan indikator pada tabel 3. 2, dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator kinerja **“Angka Kelahiran Total (TFR)”**. Total Fertility Rate adalah jumlah kelahiran hidup tiap wanita usia subur hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya, TFR dihitung dengan cara mencari rata-rata ASFR (Age Specific Fertility Rate) dari 7 (Tujuh

Kelompok Umur), lalu dikali 5 dan dibagi 1000. Total Fertility Rate pada Tahun 2025 adalah 1,62% dari target 2,01%.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini =

$$\frac{2,01 - (1,62 - 2,01)}{2,01} \times 100\% = 119\%$$

Analisis keberhasilan. Angka TFR berhasil diturunkan berkat kerjasama yang erat antara staf Dinas P2KB, PKB, dan kader PPKBD dan Sub PPKBD. Penyuluhan KB yang intensif, pemasangan KB dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi merupakan faktor pendorong kesuksesan penurunan angka TFR ini. Diharapkan angka TFR ini akan stabil di angka 2 sebagai angka ideal dalam menjaga pertumbuhan penduduk Manggarai.

2. Indikator kinerja **“Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)”**, realisasinya 40,12 % (yang artinya dari 100 peserta KB aktif, sebanyak 40 sampai 41 orang menggunakan MKJP seperti IUD, Implan, MOW dan MOP), dari target 46,28 %. Nilai realisasi ini diperoleh dari “Jumlah peserta KB aktif MKJP (11.568) dibagi jumlah peserta KB aktif (28.831) dikali 100%”.

Realisasi indikator ini diharapkan semakin meningkat, maka capaian kinerja indikator ini : **40,12/46,28 x 100 % = 87%.**

Analisis keberhasilan/kegagalan. Presentase MKJP belum memenuhi target 46,28% disebabkan oleh antara lain ketersediaan obat dan alat kontrasepsi di fasilitas Kesehatan yang terbatas dan terlambat dikirim dari Kantor wilayah provinsi NTT.

Solusi. Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan harus selalu diperhatikan agar jangan sampai menunggu stok habis baru melakukan pemesanan.

3. Indikator kinerja **“Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)”** realisasinya 58,48% (yang artinya terdapat 58 sampai 59 akseptor KB per 100 pasangan usia subur), dari target 74,73 %. Nilai realisasi ini diperoleh dari “Jumlah peserta KB aktif modern 28.831 dibagi jumlah PUS riil 48.783 dikali 100 %”.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini = **58,48/74,73 x 100 % = 78%.**

Analisis keberhasilan/kegagalan. Presentase Mcpr belum memenuhi target disebabkan oleh antara lain kesadaran masyarakat untuk memakai alat dan obat KB masih rendah.

Solusi, Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) perlu ditingkatkan lagi di tahun ini agar masyarakat semangat dan mau ber-KB

4. Indikator kinerja **“Persentase sasaran PUS ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)”**, realisasinya 10,86 % (yang artinya terdapat 10 sampai 11 orang yang ingin menunda kehamilan dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, dari 100 pasangan usia subur) dari target 10,7 %. Angka realisasinya diperoleh dari “Jumlah PUS tak ber-KB yaitu PUS yang ingin anak tapi ditunda (IAT) dan PUS yang tidak ingin anak lagi (TIAL) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 5.298 PUS dibagi total PUS riil 48.783 dikali 100%”.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin menurun. Maka capaian kinerja indikator ini :

$$\frac{10,7 - (10,86 - 10,7)}{10,7} \times 100 \% = 98\%$$

Analisis keberhasilan/kegagalan. Angka *Unmet Need* masih tinggi disebabkan oleh antara lain masalah budaya masyarakat Manggarai. Contoh, PUS yang suaminya bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia melarang istrinya untuk memakai alat atau obat KB karena khawatir pasangannya bisa selingkuh.

Solusi. Program KIE perlu ditingkatkan lagi agar ketahanan keluarga semakin kuat. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu digalakkan agar mengurangi jumlah masyarakat yang terpaksa merantau ke luar daerah meninggalkan pasangannya.

5. Indikator kinerja **“Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)”**, realisasinya 3,35 % (yang artinya terdapat 3 sampai 4 orang yang tersosialisasi dari setiap 100 orang) dari target 3,33%. Angka realisasinya diperoleh dari “Jumlah masyarakat yang terpapar sosialisasi program KKBPK/Bangga Kencana 11.934 dibagi total jumlah masyarakat 356.137 dikali 100 %.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini = **3,35 / 3,33 x 100 % = 100%**.

Analisis keberhasilan/kegagalan. Presentase masyarakat yang terpapar program Bangga Kencana belum memenuhi target disebabkan oleh

antar lain keterbatasan personil untuk melakukan penyuluhan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Solusi. Jumlah penyuluh KB di desa dan kecamatan ditambah.

6. Indikator kinerja “**Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**”, realisasinya 6,98 % dari target 9,76 %. Angka realisasi ini diperoleh dari “Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (3 OPD) dibagi jumlah total perangkat daerah (43 OPD) dikali 100 %.

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat. Maka capaian kinerja indikator ini = $6,98 / 9,76 \times 100 \% = 71\%$.

Analisis keberhasilan/kegagalan, Realisasi untuk indikator ini diupayakan meningkat dengan menambah kerja sama yang erat dan terus menerus antar lingkup OPD Kabupaten manggarai.

7. Indikator kinerja “**Persentase Keluarga Sejahtera**”. Untuk menghitung realisasi indikator ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki data pasti berapa jumlah keluarga sejahtera dan tidak sejahtera. Maka Dalam perhitungan ini, Dinas P2KB, menggunakan data jumlah keluarga yang memiliki rumah berdinding tembok yaitu: 41.236 keluarga (hasil PK 2024) dibagi jumlah total keluarga yaitu: 103.080 Keluarga (data agregat semester 2 Dispendukcapil). Berdasarkan data tersebut Realisasi Presentase Keluarga Sejahtera pada tahun 2025 adalah 31,03%.

Capaian Kinerja untuk indikator Presentase Keluarga Sejahtera: $40,0\%/31,03\% \times 100\% = 128,9 \%$.

Analisis keberhasilan/kegagalan. Jumlah keluarga sejahtera berhasil mencapai target dan diharapkan akan terus meningkat kedepannya.

8. Indikator kinerja “**Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan yang aktif**”, realisasinya 25 % dari target 33,33%. Angka realisasi ini diperoleh dari jumlah PPKS yang aktif (3 Kelompok) dibagi jumlah Kecamatan (12 Kecamatan).

Realisasi untuk indikator ini diharapkan semakin meningkat, maka capaian kinerja indikator ini = $25/33,33 \times 100 \% = 75\%$

Analisis keberhasilan/kegagalan. Jumlah PPKS aktif di setiap kecamatan rendah disebabkan oleh antara lain minimnya jumlah personil yang melayani masyarakat di setiap kecamatan.

Solusi. Penambahan jumlah personil yang mengerti ilmu konseling keluarga.

B. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.268.736.808,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.699.306.217,- atau 83,07%.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Keuangan DP2KB Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Operasi	9.092.586.808	7.699.306.21	82,74
Belanja Pegawai	2.037.384.458	1.956.788.528	96,04
Belanja Barang dan Jasa	7.055.202.350	5.566.620.309	78,90
Belanja Modal	176.150.000		99,86
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.150.000	175.897.380	99,86
TOTAL	9.268.736.808	7.699.306.217	83,07

2. Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda				2.522.582.958	2.425.771.913	96,16
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		6.244.000	6.244.000	100
	1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5.222.000	5.222.000	100
	2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1.022.000	1.022.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun		2.051.784.458	1.971.188.528	96,07
	3). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bln	24 Orang/Bln	100	2.037.384.458	1.956.788.528	96,04
	4). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	100	14.400.000	14.400.000	100

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal	1 Tahun	1 Tahun		305.214.500	302.070.532	98,97
	5.)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	160.290.000	160.219.000	99,96
	6.)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	2.520.000	2.520.000	100
	7.)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	42.271.500	42.271.500	100
	8.)	Penyediaan Bahan-Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	70.423.000	70.363.682	99,92
	9.)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	29.710.000	26.696.350	89,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah		Sasaran: Terwujudnya pengadaan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	32.600.000	32.418.380	99,44
	10.)	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 paket	1 paket	100	32.600.000	32.418.380	99,44
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun		19.140.000	17.192.417	89,82
	11.)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100
	12.)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	15.000.000	13.052.417	87,02

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	13).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	2.140.000	2.140.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal	1 Tahun	1 Tahun	100	107.600.000	96.658.056	89,83
	14).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98 Unit	98 Unit	100	101.600.000	90.658.056	89,23
	15).	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100	6.000.000	6.000.000	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		Sasaran : Meningkatnya Capaian Keluarga Berencana			100	4.998.113.850	4.205.155.304	84,13
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Tahun	1 Tahun	100	1.374.773.850	1.308.083.304	95,15

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	16).	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	124 Laporan	124 Laporan	100	231.600.000	228.260.000	98,56
	17).	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	500 Laporan	500 Laporan	100	924.053.850	872.973.304	94,47
	18).	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah laporan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 laporan	1 laporan	100	219.120.000	206.850.000	94,4
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Sasaran: Terwujudnya Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 Tahun	1 Tahun	100	1.725.560.000	1.403.530.000	81,34
	19).	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	747 orang	747 orang	100	1.654.090.000	1.340.390.000	81,03
	20.)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan program Bangga Kencana	1 organisasi	1 organisasi	100	71.470.000	63.140.000	88,34

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran: Terwujudnya Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	100	1.144.475.000	774.252.000	67,65
	21). Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	72 Laporan	72 Laporan	100	32.400.000	32.400.000	100
	22). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2537 Orang	1560 orang	66	1.112.075.000	741.852.000	66,71
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sasaran: Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	1 Tahun	1 Tahun	100	753.305.000	719.290.000	95,48

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	23).	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	27 Kampung	27 Kampung	100	174.505.000	142.440.000	81,63
	24).	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	104 laporan	104 laporan	100	578.800.000	576.850.000	99,66
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Sasaran : Meningkatnya Jumlah Keluarga Sejahtera	1 tahun	1 tahun	100	174.804.0000	1.068.379.000	61,12
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Tahun	1 Tahun	100	157.440.000	141.098.000	89,62
	25.)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	1 tahun	1 tahun	0	14.820.000	0	0

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Keuangan Keluarga)						
	26.)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 tahun	1 tahun	100	12.620.000	12.560.000	100
	27).	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Unit	10 Unit	100	130.000.000	128.538.000	98,88
		Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	1 tahun	1 tahun	100	1.590.600.000	927.281.000	58,3

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	28). Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah laporan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)	723 laporan	350 laporan	56	723.000.000	412.000.000	56,98
	29). Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	Jumlah laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	723 laporan	723 laporan	100	867.600.000	515.281.000	59,39
TOTAL						9.268.736.808	7.699.306.217	83,07

3. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.5

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian
Berdasarkan Kinerja Sasaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif/Tidak Efetif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien/Tidak Efisien
1.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	94,61	Efektif	83,07	Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah 94,61% dengan kategori efektif dengan realisasi anggaran yang tinggi yaitu 83,07% dengan kategori efisien.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesertaan masyarakat untuk mengikuti Program Bangga Kencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Tahun 2025 menyajikan capaian yang nilainya 94,61%. Dari total delapan indikator kinerja DP2KB Tahun 2025, ada 5 (lima) Indikator yang capaiannya di atas 80 %, yaitu

- a. Total fertility Rate capaiannya 119 %;
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern capaiannya 87 %;
- c. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet Need) capaiannya 98%.
- d. Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) capaiannya 100 % ;
- e. Persentase keluarga sejahtera capaiannya 128,9% ; dan

Adapun 3 (Tiga) indikator yang capaiannya di bawah 80 % adalah:

- a. Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern capaiannya 78%;
- b. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk capaiannya 71% ;
- c. Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif capaiannya 75% ; dan

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja tahun 2025.

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Adanya penyuluhan dan KIE yang dilakukan secara intensif mengenai Keluarga Berencana;
- b. Adanya upaya – upaya pendekatan yang intensif oleh tenaga lapangan (PKB, PPKBD dan Sub PPKBD);
- c. Ketersediaan Alat Kontrasepsi yang mencukupi;
- d. Pelayanan Kontrasepsi KB yang intensif sampai di pelosok – pelosok.
- e. Adanya pelatihan tenaga pelayanan kontrasepsi.

Adapun hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pengetahuan generasi muda mengenai Keluarga Berencana dan Generasi Berencana;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunda usia pernikahan sampai berusia di atas 20 tahun;
- c. Kurangnya motivasi dari generasi yang lebih tua bagi PUS Mupar agar memiliki 2 (Dua) anak;
- d. Masih adanya keraguan dan ketakutan dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk pelayanan kontrasepsi karena berpikir akan dikenakan biaya yang mahal untuk pelayanan kontrasepsi;
- e. Alat kontrasepsi yang diminati masyarakat yang hendak memasang kontrasepsi habis stok.

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka DP2KB telah menerapkan beberapa strategi untuk peningkatan kinerja dan langkah-langkah antisipatif untuk pemecahan beberapa masalah yang ada.

A. Strategi Peningkatan Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai adalah:

- a. Peningkatan Peranserta Institusi Masyarakat terutama kader seperti PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Pendamping Keluarga (TPK);
- b. Pembinaan Keluarga Berencana bagi keluarga-keluarga;
- c. Pelayanan Kontrasepsi jangka panjang gratis;
- d. Pembinaan Ketahanan Keluarga bagi calon pengantin dan keluarga muda.

B. Uraian Strategis Pemecahan Masalah serta langkah-langkah antisipatif yang diambil

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kurang berhasil pencapaian sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan penyuluhan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan risiko menikah dan melahirkan di bawah usia 20 tahun dengan sosialisasi;
- c. Meningkatkan kapasitas kader kelompok ina Keluarga Balita, agar semakin banyak peserta Poktan BKB yang menjadi peserta/akseptor KB.

Langkah-langkah korektif, yaitu:

Melakukan koordinasi dengan faskes – faskes mengenai ketersediaan Alokon KB, apabila ada permintaan alokon KB di DP2KB yang tidak bisa terpenuhi karena kehabisan stok.

Ruteng, 05 Februari 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai,



Maria Yustina Diana Baru, S.ST., M.Kes.

Pembina

NIP. 19710924 199903 2 006